



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memeberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



AGUS ZAENAL ARIFIN, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810104 199912 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Ringkasan Capaian Kinerja: Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Persentase Realisasi

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,65	55,55	91,59
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,08	57,63	84,65
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	90,84	90,72	99,87
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	93,50	90,45	96,74
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	6,60	46,89	710
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	80,18	80,62	100,55
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	90	73,53	81,7
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan per satuan penduduk	19,15	31,64	165,22

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

1. Nilai SAKIP perangkat daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 55,55% dari target yang ditetapkan sebesar 60,65. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu tindak lanjut untuk perbaikan.

2. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar 57,63% dari target yang telah ditetapkan sebesar 68,08%, dimana luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Blitar seluas 28.013 Ha. Hal ini berarti 16.143,89 Ha dalam keadaan baik. Meskipun belum seluruh jaringan irigasi dalam kondisi baik, namun Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, maupun operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pada tahun 2025 telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 15,3 km. Infrastruktur irigasi yang baik dan memadai dapat memastikan ketersediaan air pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa segmen jaringan irigasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan berkelanjutan agar kinerja sistem irigasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

3. Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman

Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman sebesar 90,72 dari target yang ditetapkan yaitu 90,84. Pencapaian SPM bidang air minum Kabupaten Blitar yang melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM sebanyak 324 RT yang terdiri dari jaringan perpipaan sebanyak 324 RT dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 0 RT. Hal ini berarti sebanyak 377.909 RT telah mendapatkan akses air minum dari jumlah RT di Kabupaten Blitar sebanyak 416.567 RT Adapun data

jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
di Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sambungan Rumah	2056	3822	3945	324
2	Anggaran	10.834.356.344.00	16.020.717.328.00	16.210.559.420	6.665.951.670
3	Capaian SPM	88,51%	89,13%	90,64%	99,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2025.

Jumlah sambungan rumah pada tahun 2025 hanya sebesar 324 SR. Hal ini dikarenakan anggaran yang jauh lebih rendah dari tahun 2024, semula mencapai Rp 16.210.559.420 sedangkan pada tahun 2025 hanya sebesar Rp 6.665.951.670.

4. Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman

Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90,45 dan masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 93,5. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana DAK Sanitasi pada tahun 2025 karena efisiensi, sehingga dana DAU yang ada dimaksimalkan untuk pemenuhan akses sanitasi layak dan aman.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengamanatkan terwujudnya 100% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 30% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka buang air besar sembarangan (BABS) hingga 0% pada akhir tahun 2025. Kementerian PUPR mendorong akses sanitasi aman melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Blitar adalah 459.648,00 KK. Capaian akses sanitasi aman Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 2,04% atau sebanyak 9.375 KK, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,94%. Angka capaian ini memang relative kecil karena Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), namun telah bekerjasama untuk memanfaatkan IPLT Kota Blitar. Sedangkan capaian akses sanitasi layak termasuk aman Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 90.45% atau sebanyak 415.771 KK meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 89,19% %. Untuk prosentase akses belum sanitasi belum layak masih sebesar 9,55 % atau sebanyak 43.877 KK.

Dalam mewujudkan akses sanitasi layak dan aman, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan lintas OPD seperti Dinas Kesehatan. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses Sanitasi Aman.

Kegiatan Sanitasi Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 memperoleh anggaran dari sumber pendanaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU sebesar Rp.4.363.918.000,00,00. Jumlah ini berkurang jauh dari anggaran

tahun 2024 sebesar Rp.12.856.000.000,00. dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta kabupaten Blitar Belum Mempunyai IPLT sebagai syarat bantuan pendanaan dari DAK-APBN Secara keseluruhan jumlah total masyarakat yang penerima dalam kegiatan Sanitasi Air Limbah ada 190 KK.

Lokasi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dilaksanakan pada desa usulan Musrenbang meliputi desa Pasirharjo kecamatan Talun dan Desa Ngrejo kecamatan Bakung sebanyak 20 unit dan untuk desa yang menjadi lokus stunting meliputi Desa Popoh Kec. Selopuro, Desa Sidomulyo Kec. Selorejo, Kelurahan Klemunan Kec. Wlingi, Desa Tegalasri Kec. Wlingi, Desa Butun Kec.Gandusari, Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Desa Sumberagung Kec.Gandusari, Desa Mandesan Kec. Selopuro, Desa Dawuhan Kec. Kademangan, Desa Sawentar Kec. Kanigoro, Desa Kedawung Kec. Nglegok, Desa Candirejo Kec. Ponggok, Desa Sidorejo Kec. Ponggok, Desa Plosorejo Kec. Kademangan dan Desa Karangrejo Kec. Garum

Sasaran utama dari program ini adalah untuk warga dengan akses sanitasi belum layak (belum mempunyai jamban layak) yang diutamakan untuk Keluarga Anak Stunting, Keluarga Beresiko Stunting, keluarga Miskin ekstrem dan keluarga miskin/ Pra sejahtera/ MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) dari data SK Stunting ataupun dari usulan proposal desa penerima program jambanisasi. Tujuan program ini untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan.

Adapun data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2
Data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S)

No.	Desa/ Kelurahan	Unit
1	Desa Pasirharjo Kec. Talun (Musrenbang)	10
2	Desa Ngrejo Kec. Bakung (Musrenbang)	10
3	Desa Popoh Kec. Selopuro	12
4	Desa Sidomulyo Kec. Selorejo	12
5	Kelurahan Klemunan Kec. Wlingi	8
6	Desa Tegalasri Kec. Wlingi	12
7	Desa Butun Kec. Gandusari	12
8	Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi	12
9	Desa Sumberagung Kec. Gandusari	12
10	Desa Mandesan Kec. Selopuro	12
11	Desa Dawuhan Kec. Kademangan	12
12	Desa Sawentar Kec. Kanigoro	12
13	Desa Kedawung Kec. Nglegok	12
14	Desa Candirejo Kec. Ponggok	12
15	Desa Sidorejo Kec. Ponggok	12
16	Desa Plosorejo Kec. Kademangan	9
17	Desa Karangrejo Kec. Garum	9
Sub Jumlah		190 Unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar, 2025.

Untuk mencapai target akses sanitasi aman dengan target 30% RPJMN pada tahun 2029 dan sesuai Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2023-2028, maka Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sebagai langkah awal, Dinas PUPR pada tahun 2024 menyusun *Readiness Criteria* IPLT berupa Studi Kelayakan/ FS dan tahun 2025 telah melakukan penyusunan DED IPLT, Dokumen Pertek

BMAL IPLT dan RISPAL Kabupaten Blitar. Pembangunan fisik IPLT direncanakan akan diusulkan melalui melalui pendanaan DAK Jangka menengah 2027-2028. Adapun kekurangan penyiapan *Readiness Criteria IPLT adalah dokumen UKL UPL IPLT*. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 Sektor Air Limbah Domestik menyatakan IPLT merupakan kebutuhan untuk mencapai akses aman sanitasi yang berkelanjutan.

5. Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota

Pada penghitungan persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 46,89%, data tersebut diperoleh dari perbandingan rekom PBG dan SLF yang telah terbit dengan jumlah total pengajuan pada tahun berkenaan. Hal ini jauh melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6,6, dimana target tersebut diperoleh dengan penyebut yang lebih besar yang merupakan data dari tahun ke tahun.

6. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/223/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten bahwa total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.462,480 km. Capaian persentase kondisi jalan mantap di Kabupaten Blitar tahun 2025 mencapai 80,62% atau sepanjang 1.179,020 km. Angka ini lebih tinggi dari pada capaian presentase kondisi mantap tahun 2024 dengan sebesar 79,68% atau 1.165,308 km.

Capaian persentase kondisi jalan mantap tahun 2025 sebesar 80,62% sudah sesuai target 82,10% atau sepanjang 1.179,05 km dari total panjang jalan Kabupaten 1.462,48 km. Peningkatan kemantapan tersebut tercatat sebesar 0,94%, yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan program pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan yang telah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun demikian, di tengah capaian positif tersebut, masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kondisi kemantapan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

meningkatnya beban lalu lintas, kondisi cuaca, usia perkerasan jalan, serta keterbatasan penanganan pada ruas-ruas tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut agar kemantapan jaringan jalan secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan secara merata.

Tabel 3
Perbandingan Kondisi Jalan yang Dibangun Dinas PUPR
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kondisi Jalan	2024		2025	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Kondisi Jalan				
Mantap	1.165,308	79,68%	1.179,020	80,62
- Baik	419,69	28,70%	387,655	26,51
- Sedang	745,618	50,98%	791,355	54,11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2025.

Upaya peningkatan kondisi jalan terus dilakukan, pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi jembatan. Beberapa kegiatan peningkatan jalan yang telah dilaksanakan dan masuk dalam Proyek Strategis Daerah tahun 2025, antara lain:

- 1) Rehabilitasi Jalan Sumberagung – Watugede (Ruas 404), panjang 288 meter, lebar 5 meter, konstruksi perkerasan rigid/beton
- 2) Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Ilik-Ilik Desa Kebonsari Kec. Kademangan (Ruas 382) & Pembangunan Saluran Drainase RT 01-01 Dusun Ilik-ilik - RT 04/01 Dusun ilik-ilik, Kab. Blitar (Ruas 382) Panjang Talud atas 120 meter, tinggi rata-rata 2,5 meter ; Panjang Talud Bawah 66 meter, tinggi rata-rata 5 meter dengan pondasi dalam ; dan penanganan jalan

dengan konstruksi hotmix sepanjang 1,05 km dengan lebar 5 meter.

Dengan adanya peningkatan jalan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah sehingga memudahkan mobilitas masyarakat, mempersingkat waktu perjalanan, dan memperlancar akses ke aktivitas perekonomian (pariwisata, pertanian, peternakan, dll) maupun ke fasilitas umum (sekolah, pasar, dan pusat kesehatan, dll).

Untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Pansela, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PUPR melakukan peningkatan jalan Sirip Pansela dan penyelesaian pembebasan lahan Pansela. Pada tahun 2025 dilakukan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan di ruas – ruas yang mengarah ke Pansela pada Kecamatan Wates, Panggungrejo, Sutojayan, Bakung dan Wonotirto. Sedangkan untuk pembebasan lahan Pansela pada tahun 2025 direncanakan penyelesaian pembebasan lahan pada Ruas Jalan Sp. Jolosutro – Bts. Kab Malang, namun dikarenakan adanya pembebasan lahan tahun 2003 dan diperlukan proses pengukuran ulang terhadap aset terdahulu maka sampai dengan bulan Desember 2025 telah disusun sampai dengan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) pada ruas tersebut dan akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya di tahun anggaran 2026.

Pada pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan tahun 2025, juga telah diselesaikan 31 unit jembatan dari target 36 unit, yang terdiri dari rehabilitasi jembatan sebanyak 4 unit dan pemeliharaan berkala jembatan sebanyak 27 unit, sebagai berikut :

Tabel 4
Data Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jembatan

No	Pekerjaan	Kegiatan
1	Rehabilitasi Jembatan Sumberingin - Jeding (Ruas 95)	Rehabilitasi Jembatan
2	Rehabilitasi Jembatan Bororejo - Kebonduren (Ruas 36)	
3	Rehabilitasi Jembatan Sungai Mlalo Talun	
4	Rehabilitasi Sayap Jembatan Sukorejo Manten (Ruas 19)	
5	Plat Jembatan + Jalan Kedungbulus Binangun	Pemeliharaan Berkala Jembatan
6	Plat Duiker Ds.kandangan Srengat	
7	Plat Duiker Ds.Gandekan Srengat	
8	Plat Duiker Ds.Ngadirenggo – Wlingi	
9	Plat Duiker Kamulan -Talun	
10	Plat Duiker Ds.Sambong Kec. Kanigoro	
11	Plat Duiker Ds. BAREK – DOKO	
12	Plat Duiker Desa Sumberurip Doko (SD)	
13	Plat Duiker Dsn.Sumbermanggis - Sumberurip Doko	
14	Talud dan Saluran Ds.Boro-Selorejo	
15	Plat Injak Jembatan Tegalasri	
16	Sayap Jembatan ds. Sukorame Binangun	
17	Plat Duiker Kel. Garum Garum	
18	Plat Duiker Ds. Sukosewu Gandusari	
19	Plat Duiker Tegalorejo Selopuro	
20	Talud Ds.Dawuhan – Kademangan	
21	Sayap Jembatan Ds. Ngeni Wonotirto	
22	Plat Duiker Dsn. Nongkorejo - Ngadirenggo Wlingi	
23	Talud Ds.Sumberasri-Nglegok	
24	Plat Duiker Desa Balerejo	
25	Talud Ds. Sumberurip – Doko	
26	Plat Duiker Pikatan – Wonodadi	
27	Plat Duiker Ds. Bendosewu Talun	
28	Plat Duiker Kaulon I	
29	Plat Duiker Kaweron	

No	Pekerjaan	Kegiatan
30	Plat Duiker Tunjung – Udanawu	
31	Plat Duiker kaulon II	

g) Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang

Target dari indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2025 sebesar 85%, terealisasi sebesar 73,53%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pengajuan KKPR dengan jumlah penerbitan persetujuan KKPR. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blitar sudah mempedomani dan mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam proses pemanfaatan ruang khususnya terkait perijinan di Kabupaten Blitar terdapat mekanisme pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

h) Cakupan area pelayanan persampahan per satuan penduduk

Target dari indikator ini sebesar 19,15% dan dapat terealisasi sebesar 31,64%. Desa yang terbangun TPA/TPS3R di Kabupaten Blitar sebanyak 15 desa dengan luasan wilayah 502,74 km². Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Blitar masih membutuhkan lebih banyak lagi TPA/TPS/TPS3R untuk melayani pembuangan sampah di Kabupaten Blitar.

B. Ringkasan Kendala dan Langkah Kedepan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah :

- 1) Keterlambatan dalam pelaksanaan proses pengadaan sehingga waktu dalam pelaksanaan kegiatan sangat minim
- 2) Kegiatan fisik mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya sehingga terdapat pekerjaan yang belum dapat terselesaikan pada tahun berkenaan dan melewati Tahun Anggaran (pekerjaan lompat tahun)
- 3) Terdapat beberapa dokumen administrasi yang belum tepat waktu untuk penyelesaiannya sehingga terlambat dalam proses pencairan (penyerapan anggaran)
- 4) Kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia (pelaksanaan pekerjaan) sehingga terdapat beberapa dokumen administrasi yang belum sesuai target dalam penyelesaiannya
- 5) Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan serta adanya dinamika pergeseran pejabat.

Solusi permasalahan yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan sejak awal tahun anggaran, bahkan sebelum DPA ditetapkan, meliputi penyusunan RUP, KAK, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Dengan perencanaan yang matang, proses pemilihan penyedia dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu terlalu lama.
- 2) Menyusun jadwal pengadaan dan pelaksanaan kegiatan secara realistis dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, kondisi lapangan, serta faktor cuaca, sehingga risiko keterlambatan dan pekerjaan lompat tahun dapat diminimalkan.
- 3) Menetapkan timeline dan batas waktu (deadline) yang jelas untuk setiap tahapan penyusunan dan penyelesaian dokumen administrasi keuangan, mulai dari pengajuan SPP, SPM, hingga SP2D, serta memastikan seluruh pihak terkait mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

- 4) Melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*pre-construction meeting*) yang menekankan kewajiban penyedia jasa dalam penyampaian dokumen administrasi sesuai jadwal dan ketentuan kontrak, sehingga sejak awal penyedia memahami tanggung jawab administratifnya. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*pre-construction meeting*) yang menekankan kewajiban penyedia jasa dalam penyampaian dokumen administrasi sesuai jadwal dan ketentuan kontrak, sehingga sejak awal penyedia memahami tanggung jawab administratifnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
A. Ringkasan Capaian Kinerja: Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Persentase Realisasi	i
a. Nilai SAKIP perangkat daerah	i
b. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik.....	ii
c. Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	ii
Tabel 1	iii
Tabel 2	vi
Tabel 3	viii
Tabel 4	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I	1
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	3
C. Dasar Hukum.....	13
D. Sistematika	16
BAB II	17
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 2.1	18
Tabel 2.2	19
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	20
Tabel 2.3	21
BAB III	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi	22
Tabel 3.1.1	23
Tabel 3.1.2	23
Tabel 3.1.3	24
Tabel 3.1.4	24
Tabel 3.1.5	28
Tabel 3.1.6	30

Tabel 3.2.1	34
Tabel 3.2.2	35
Tabel 3.2.3	35
Tabel 3.2.4	36
Tabel 3.2.5	38
Tabel 3.2.6	38
Tabel 3.3.1	41
Tabel 3.3.2	42
Tabel 3.3.3	43
Tabel 3.3.4	44
Tabel 3.3.5	45
Tabel 3.3.6	46
Tabel 3.4.1	48
Tabel 3.4.2	49
Tabel 3.4.3	50
Tabel 3.4.4	51
Tabel 3.4.5	52
Tabel 3.4.6	53
Tabel 3.5.1	55
Tabel 3.5.2	55
Tabel 3.5.3	56
Tabel 3.5.4	56
Tabel 3.5.5	58
Tabel 3.5.6	59
Tabel 3.6.1	61
Tabel 3.6.2	62
Tabel 3.6.3	62
Tabel 3.6.4	63
Tabel 3.6.5	65
Tabel 3.6.6	66
Tabel 3.7.1	69
Tabel 3.7.2	70
Tabel 3.7.3	71
Tabel 3.7.4	72
Tabel 3.7.5	73
Tabel 3.7.6	74

Tabel 3.8.1	77
Tabel 3.8.2	78
Tabel 3.8.3	78
Tabel 3.8.4	79
Tabel 3.8.5	80
Tabel 3.8.6	81
Tabel 3.9.1	83
Tabel 3.9.2	85
Tabel 3.9.3	87
Tabel 3.9.4	88
Tabel 3.9.5	91
Tabel 3.9.6	91
Tabel 3.10	81
BAB IV	94
A. Kesimpulan	94
Tabel 4.1	94
Tabel 4.2	95
B. Rencana Tindak Lanjut.....	95
Tabel 4.3	96
LAMPIRAN – LAMPIRAN	116
A. POHON KINERJA.....	117
B. Indikator Kinerja Utama	99
C. Perjanjian Kinerja	101
D. Rencana Aksi Perangkat Daerah.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1	iii
Tabel 2	vi
Tabel 3	viii
Tabel 4	x
Tabel 2.1	18
Tabel 2.2	19
Tabel 2.3	21
Tabel 3.1.1	23
Tabel 3.1.2	23
Tabel 3.1.3	24
Tabel 3.1.4	24
Tabel 3.1.5	28
Tabel 3.1.6	30
Tabel 3.2.1	34
Tabel 3.2.2	35
Tabel 3.2.3	35
Tabel 3.2.4	36
Tabel 3.2.5	38
Tabel 3.2.6	38
Tabel 3.3.1	41
Tabel 3.3.2	42
Tabel 3.3.3	43
Tabel 3.3.4	44
Tabel 3.3.5	45
Tabel 3.3.6	46
Tabel 3.4.1	48
Tabel 3.4.2	49
Tabel 3.4.3	50
Tabel 3.4.4	51
Tabel 3.4.5	52
Tabel 3.4.6	53
Tabel 3.5.1	55
Tabel 3.5.2	55
Tabel 3.5.3	56
Tabel 3.5.4	56

Tabel 3.5.5	58
Tabel 3.5.6	59
Tabel 3.6.1	61
Tabel 3.6.2	62
Tabel 3.6.3	62
Tabel 3.6.4	63
Tabel 3.6.5	65
Tabel 3.6.6	66
Tabel 3.7.1	69
Tabel 3.7.2	70
Tabel 3.7.3	71
Tabel 3.7.4	72
Tabel 3.7.5	73
Tabel 3.7.6	74
Tabel 3.8.1	77
Tabel 3.8.2	78
Tabel 3.8.3	78
Tabel 3.8.4	79
Tabel 3.8.5	80
Tabel 3.8.6	81
Tabel 3.9.1	83
Tabel 3.9.2	85
Tabel 3.9.3	87
Tabel 3.9.4	88
Tabel 3.9.5	91
Tabel 3.9.6	91
Tabel 3.10	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	2
Gambar Pohon Kinerja	98

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sub urusan bina marga, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pembinaan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis.

Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

(Gambar Struktur Organisasi)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 74 Orang yang terdiri dari ASN sebanyak 74 Orang dan Non ASN sebanyak - Orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	4 Orang
3	Pengawas	2 Orang
4	Pelaksana	58 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	2 Orang

No	Jenis Jabatan	Jumlah
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	6 Orang
7	Jabatan Fungsional Ahli Madya	1 Orang
dst	Total	74 Orang

Sumber: Sidawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke 2 (sebutkan misi RPJMD yang didukung), Sasaran ke 1 yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur (sebutkan sasaran RPJMD yang didukung) dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur (sebutkan indikator kinerja sasaran RPJMD).

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.2
Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1.	Dinas PUPR dapat memprioritaskan peningkatan jalan di daerah pedesaan untuk mendukung mobilitas dan akses terhadap layanan dasar.	Belum meratanya kualitas jaringan jalan	Dinas PUPR perlu memastikan bahwa semua proyek pembangunan jalan mematuhi peraturan	Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan banjir yang dapat mempercepat	Perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di berbagai daerah.	Daerah pedesaan sering kali memiliki kualitas jalan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dinas	Meratanya Kualitas Jaringan Jalan

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			lingkungan yang berliku dan melakan kajian dampak lingkungan yang diperlukan	kerusakan jalan. Dinas PUPR perlu merencanakan desain jalan yang ketahanan terhadap kondisi ini.	Jalan yang tidak kuat atau tidak dirawat bisa menjadi tidak layak saat bencana terjadi, sehingga penting bagi Dinas PUPR untuk merancang jalan yang tangguh dan mampu menahan beban dan dampak bencana.	PUPR perlu meningkatkan fokus pada perbaikan infrastruktur di daerah terpencil untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk.	
	Dinas PUPR dapat melakukan Penilaian Kualitas Jalan dengan melaksanakan survei dan monitoring terhadap kualitas jaringan jalan yang ada. Dan juga dengan Penggunaan Teknologi seperti drone atau aplikasi pemetaan untuk menilai dan memantau kondisi jalan secara lebih efektif.		Perbaikan jaringan jalan di wilayah rawan bencana harus mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana, seperti banjir dan tanah longsor.	Memfaatkan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (GIS) dan big data untuk pemantauan dan perencanaan infrastruktur jalan yang lebih baik.	Berbagai program nasional seperti Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur (P3I) yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan meningkatkan infrastruktur jalan, namun perlu ada penekanan pada kondisi lingkungan	Pengembangan infrastruktur jalan harus memperhatikan dampak lingkungan, termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan lahan yang tepat. Proyek jalan harus melibatkan analisis dampak	

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			KLHS wajib mengevaluasi risiko ini dan merencanakan perbaikan yang tahan lama.		n dan sosial dalam implementasinya.	lingkungan yang komprehensif.	
2.	Pembangunan saluran irigasi yang terencana dan berkualitas dapat meningkatkan distribusi air ke lahan pertanian dan mengurangi kerugian akibat kebocoran.	Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Irigasi	Pembangunan atau perbaikan sistem irigasi yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis dapat menyebabkan perubahan pada habitat alami dan keanekaragaman hayati di sekitar daerah irigasi. KLHS perlu melakukan	Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrem, termasuk curah hujan yang tidak menentu. Ini mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi. Dinas PUPR perlu membangun sistem irigasi yang dapat menyesuaikan dengan perubahan iklim dan mencari solusi adaptif.	Terdapat ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur irigasi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara pulau-pulau. Dinas PUPR perlu memperhatikan kesenjangan ini untuk memastikan semua daerah mendapatkan akses yang sama terhadap sistem irigasi yang baik.	Berbagai daerah memiliki kondisi geografis dan iklim yang berbeda, yang mempengaruhi cara pengelolaan irigasi. Daerah dataran rendah mungkin menghadapi masalah banjir, sementara daerah perbukitan mungkin mengalami kekeringan. Dinas PUPR perlu mempertimbangkan karakteristik lokal dalam merancang sistem irigasi	Optimalisasi Pengelolaan Daerah Irigasi

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			analisis mendalam tentang dampak ini dan merumuskan langkah mitigasi.			yang optimal.	
	Mengintegrasikan pengelolaan irigasi dengan rencana pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pertanian.		Pengelolaan irigasi yang tidak optimal mempengaruhi produktivitas pertanian, yang berdampak pada ketahanan pangan. KLHS harus mengevaluasi kontribusi irigasi yang efektif untuk strategi pertanian berkelanjutan	Penggunaan teknologi mutakhir seperti sensor tanah, irigasi presisi, dan sistem manajemen air berbasis data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas irigasi. Dinas PUPR perlu mempromosikan adopsi teknologi ini di antara petani untuk meningkatkan produktivitas	Pengelolaan irigasi yang menghasilkan pengguna air secara berlebihan dapat merusak ekosistem, seperti mengakibatkan penurunan permukaan air tanah dan kerusakan habitat. Dinas PUPR harus merumuskan kebijakan yang berfokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.	Pengelolaan daerah irigasi yang tidak baik dapat mencemari sumber air, mengurangi kualitas dan kuantitas yang tersedia untuk ekosistem lokal. Dinas PUPR perlu melakukan evaluasi dampak lingkungan dari irigasi dan memastikan penerapan praktik yang ramah lingkungan.	

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			n dan ketahanan pangan nasional.	pertanian.			
3.	Dinas PUPR dapat fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada untuk meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi, mengurangi kebocoran dan peningkatan kapasitas.	Minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Penggunaan Teknologi untuk Optimalisasi Irigasi : KLHS harus mengevaluasi potensi penerapan teknologi modern dalam pengelolaan irigasi, seperti sistem irigasi presisi dan pemanfaatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi jaringan irigasi.	Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan, meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan. Ini memengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan bisa memperburuk kondisi infrastruktur yang sudah minim pemeliharaannya.	Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Dinas PUPR perlu memperhatikan kondisi ini dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.	Banyak jaringan irigasi di daerah mengalami degradasi karena kurangnya pemeliharaan. Dinas PUPR perlu melakukan pemeriksaan rutin dan perbaikan untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik.	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi
4.	Dinas PUPR dapat memfasilitasi pembangu	Belum terpenuhinya layanan air minum	KLHS perlu menilai	Perubahan iklim menyebabkan	Perubahan iklim menyebabkan	Beberapa wilayah mengalami	Memadainya akses air minum yang layak

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	n jaringan distribusi air minum yang lebih efektif, termasuk instalasi perpipaan dan pembangkit air bersih di daerah yang belum terlayani.		infrastruktur yang ada untuk pengelolaan dan distribusi air minum, termasuk sistem perpipaan dan instalasi pengolahan air. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan.	perubahan pola curah hujan dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, yang dapat berdampak langsung pada ketersediaan air bersih. Dinas PUPR perlu membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.	perubahan pola curah hujan, mengakibatkan fenomena cuaca seperti kekeringan dan banjir yang berdampak pada ketersediaan air. Daerah yang rentan perlu lebih banyak perhatian terkait infrastruktur penyediaan air.	kesulitan dalam menyediakan sumber air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air minum. Variasi curah hujan dan kondisi geohidrologi yang berbeda di setiap daerah dapat memengaruhi ketersediaan sumber air.	
5.	Daerah yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan fasilitas sanitasi umum	Rendahnya layanan sanitasi	KLHS harus melakukan evaluasi terhadap infrastruktur sanitasi yang ada,	Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian dalam pola curah hujan, yang dapat mengakibatkan	Pengelolaan limbah domestik yang buruk dapat menyebabkan pencemaran tanah dan sumber air, yang	Di beberapa daerah, terutama di kawasan rural atau daerah yang kurang berkembang, infrastruktur	Memadainya akses sanitasi yang layak

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	seperti toilet dan MCK (mandi, cuci, kakus) yang terstandarisasi		termasuk keberadaan toilet, septik tank, dan sistem pembuangan limbah. Ini membantu mengidentifikasi kasus daerah yang kurang terlayani.	banjir dan pencemaran sumber air. Hal ini mengganggu sistem sanitasi dan dapat meningkatkan risiko penyakit terkait sanitasi. PUPR harus memastikan bahwa infrastruktur sanitasi tahan terhadap dampak perubahan iklim.	aruhi kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan sistem pengolahan limbah dan memastikan bahwa limbah dibuang dengan benar sangat penting.	sanitasi mungkin masih buruk atau tidak ada sama sekali. Hal ini mengakibatkan akses yang sangat terbatas terhadap layanan sanitasi yang layak.	
6.	Dinas PUPR dapat merumuskan kebijakan yang mengatur penataan ruang dan bangunan agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Belum memadainya penataan bangunan dan lingkungan	Penataan bangunan yang diiringi dengan pengelolaan limbah yang tidak memadai, yang mengarah pada pencemaran tanah	Urbanisasi yang cepat menyebabkan pertumbuhan kota yang tidak terencana, mengarah pada penggunaan lahan yang tidak efisien dan terjadinya	Ketidaksiuaian Fungsi Bangunan dan Tata Ruang dimana banyak bangunan didirikan tanpa izin atau melanggar fungsi lahan, seperti kawasan resapan air yang dijadikan	Kurangnya Penegakan Aturan Tata Ruang seperti Pelanggaran RTRW atau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), misalnya kawasan pertanian atau resapan air	penataan bangunan dan lingkungan yang memadai

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			dan air. KLHS perlu menganalisis kebutuhan sistem pengelolaan limbah yang efisien.	a kawasan kumuh. Dinas PUPR perlu mengembangkan rencana tata ruang yang sustainable untuk menghadapi tantangan ini.	permukiman.	dijadikan permukiman.	
7.	Pemanfaatan Lahan Strategis yang Belum Tertata dan integrasi Kawasan Industri dan Pariwisata	Belum Optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi	Ketidaksihinggaan Penataan Ruang dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Minimnya Pembangunan Risiko Perubahan Iklim dalam Rencana Tata Ruang	Urbanisasi Cepat dan Perluasan Kawasan Kota (Rapid Urbanization) dan Perubahan iklim global menuntut agar rencana tata ruang memperhatikan mitigasi dan adaptasi risiko bencana serta Tuntutan atas Tata Kelola Ruang	Banyak daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang legal dan operasional serta Kurangnya pengguna data spasial dan teknologi GIS dalam perencanaan ruang menyebabkan ketidaktepatan	Banyak daerah strategis (kawasan industri, pariwisata, dan pelabuhan) belum memiliki RDTR yang operasional dan Banyak proyek berjalan tanpa mengacu pada RTRW/RDTR karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.	Penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
				yang Transparan dan Akuntabel	zonasi dan perencanaan investasi.		
8.	Data SDM konstruksi di daerah belum terdigitalisasi dengan baik, padahal itu penting untuk pemetaan dan perencanaan .	Masih rendahnya tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	Ketidakterpekerjaannya prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan fisik, karena SDM pelaksana tidak memahami standar teknis dan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Tuntutan Global terhadap Pembangunan Berkelanjutan dan Green Infrastructure dan Kurangnya Tenaga Ahli Terlatih dalam Mendukung Transformasi Digital dan Teknologi Konstruksi	Pemerintah Indonesia memiliki ambisi besar untuk membangun infrastruktur yang merata dan berkualitas (termasuk di kawasan 3T), namun rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat menghambat kualitas dan kecepatan pembangunan.	Daerah-daerah terpencil atau 3T sering kali kesulitan dalam mengakses pelatihan dan sertifikasi karena keterbatasan fasilitas dan lembaga pelatihan di daerah tersebut.	Tersedianya tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat

Sumber: Rancangan Renstra Dinas PUPR 2025-2029

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten (sebutkan tujuan PD) dengan sasaran

Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA, Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah, Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten, Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan, Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi. Dinas PUPR berupaya memastikan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. (sebutkan sasaran PD) yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase Rumah Tangga berakses air limbah domestik
3.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan aman
4.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
7.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang
8.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah

Sumber : (Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), 2025-2029

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	B+
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	100
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur SDA	Rasio Jaringan Irigasi	61,78
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah	Persentase RT berakses air minum	85,9
		Persentase RT berakses pengolahan air limbah domestik	72,7
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	47
		Rasio Kepatuhan IMB	1,54
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	82,66
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	79,11
		Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	21
7.	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	53,6
8.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	90
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	0,412

Sumber : (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), 2025

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,65
2.	Meningkatkatnya kualitas infrastruktur SDA	Rasio Jaringan Irigasi	68,08
3.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	90,84
4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	93,50
5.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Rasio Kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/ Kota	6,60
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	80,18
7.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	90
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	19,15

Sumber : (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), 2025

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi, semula indikator menggunakan Nilai dan Predikat SAKIP (B+) menjadi Nilai SAKIP perangkat daerah (60,65%). Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan sistem pengukuran berbasis angka (kuantitatif) sehingga evaluasi kinerja lebih objektif dan mudah dibandingkan antar periode, sejalan dengan hasil evaluasi internal dan rekomendasi evaluator SAKIP.
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA. Target rasio jaringan irigasi meningkat dari 61,78% menjadi 68,08%. Hal ini dikarenakan adanya penajaman prioritas program irigasi, tambahan penanganan jaringan

irigasi, serta penyesuaian target berdasarkan realisasi semester berjalan yang menunjukkan kinerja lebih baik dari target awal.

3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum. Indikator diperjelas dari presentase RT berakses air minum menjadi air minum layak dan aman. Target yang semula 85,9% mengalami peningkatan menjadi 90,84%. Penyesuaian indikator mengikuti standar nasional yang menekankan aspek layak dan aman, serta adanya peningkatan cakupan layanan SPAM dan kualitas air minum.
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah. Indikator diperjelas menjadi air limbah domestik layak dan aman. Target yang semula 72,7% mengalami peningkatan menjadi 93,50%. Peningkatan tersebut didorong oleh perluasan sistem pengolahan air limbah, pembangunan sarana sanitasi, serta sinkronisasi dengan target sanitasi nasional.
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung. Dari indikator persentase sarana perkantoran dan publik sesuai standar dan rasio kepatuhan IMB diubah menjadi rasio kepatuhan PBG dan SLF (6,60%). Hal ini dikarenakan mengikuti regulasi terbaru yang menggantikan IMB dengan PBG dan SLF, sehingga indikator disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan. Dari beberapa indikator (jalan mantap, drainase, jalan berdrainase) disederhanakan menjadi tingkat kemantapan jalan kabupaten, yang semula 82,66% mengalami penurunan menjadi 80,18%. Penyederhanaan indikator bertujuan meningkatkan fokus pengukuran kinerja utama, sedangkan penurunan target disesuaikan dengan kondisi riil jaringan jalan dan keterbatasan anggaran perubahan.

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 205.012.316.284,30 (Dua Ratus Lima Miliar Dua Belas Juta

Tiga Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Sen) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3

Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.115.993.533,37,-
2	Meningkatkannya kualitas infrastruktur SDA	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.978.743.350,-
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.665.951.970,-
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.363.918.000,-
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 8.286.344.900,-
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 103.191.200,-
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp. 107.946.000,-
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 138.659.118.465,93,-
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.883.216.369,-
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 2.190.000.000,-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 108.000.000,-
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 250.981.000,-
Total Anggaran			205.012.316.284,30

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025:

1. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi diukur melalui nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja / Capaian

kinerja sebesar 91,59% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Sasaran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor dan nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	60,65	55,55	91,59%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						91,59%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 55,55% dari target yang ditetapkan sebesar 60,65. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu tindak lanjut untuk perbaikan.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh lemahnya OPD dalam hal menyajikan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, adanya ketidaksinkronan antar dokumen sehingga proses perencanaan, pengukuran dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara baik dan maksimal. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.1.2

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor dan nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	60,65	55,55	60,45	86,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 90,81% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.1.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor dan nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	61,15	55,55	90,84%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah/tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan/tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.1.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota
Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional/Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor dan nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	55,55	90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a. Penguatan Kualitas Dokumen Perencanaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar melakukan upaya perbaikan terhadap dokumen perencanaan kinerja, seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, agar lebih selaras dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan menjadi fokus utama untuk mendukung implementasi SAKIP yang lebih optimal.

b. Peningkatan Sistem Pengukuran Kinerja

Upaya dilakukan melalui penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan agar lebih mencerminkan hasil (outcome) serta dapat diukur secara objektif. Pengumpulan data kinerja juga diperbaiki agar lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Optimalisasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Dinas PUPR berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja, khususnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan. Evaluasi kinerja internal dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan pemahaman aparatur terhadap SAKIP dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan koordinasi internal. Hal ini bertujuan agar seluruh unit kerja memahami perannya dalam penyusunan dokumen kinerja dan penerapan prinsip akuntabilitas.

e. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Antar Unit Kerja

Koordinasi lintas bidang terus ditingkatkan untuk mengurangi ketidaksinkronan antar dokumen dan proses bisnis. Integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai SAKIP secara bertahap.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dijadikan acuan dalam perbaikan kinerja tahun berjalan. Upaya ini dilakukan agar kelemahan yang sama tidak terulang dan kualitas penerapan SAKIP dapat meningkat pada periode Renstra 2025 – 2029.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kualitas Dokumen Perencanaan

Kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain masih adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja), baik dari sisi tujuan, sasaran, maupun indikator kinerja. Selain itu, perubahan kebijakan dan regulasi

yang terjadi dalam periode perencanaan menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen secara berulang. Keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur dalam proses penyusunan dokumen perencanaan juga mempengaruhi optimalisasi kualitas dokumen yang dihasilkan;

b. Peningkatan Sistem Pengukuran Kinerja

Hambatan utama dalam peningkatan sistem pengukuran kinerja adalah belum sepenuhnya terbangunnya indikator kinerja yang berorientasi pada outcome, sehingga sebagian indikator masih bersifat output. Selain itu, ketersediaan dan validitas data kinerja belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi sistem pencatatan maupun konsistensi pelaporan antar unit kerja. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam mengukur kinerja secara objektif dan komprehensif;

c. Optimalisasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Dalam optimalisasi pelaporan dan evaluasi kinerja, kendala yang dihadapi antara lain ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga memerlukan penyesuaian tambahan pada saat penyusunan LKjIP. Selain itu, evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga hasil evaluasi belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja;

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kendala pada upaya ini meliputi perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap konsep dan implementasi SAKIP, khususnya terkait penyusunan indikator kinerja dan pengukuran kinerja berbasis outcome. Selain itu, tingginya beban kerja dan tidak adanya jabatan perencana menyebabkan proses peningkatan kapasitas aparatur belum dapat dilakukan secara optimal dan merata di seluruh unit kerja;

e. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Antar Unit Kerja

Hambatan yang dihadapi antara lain masih terdapat ego sektoral antar unit kerja, yang berdampak pada kurang optimalnya koordinasi dan integrasi dokumen serta proses bisnis. Selain itu, mekanisme koordinasi yang belum terstruktur secara baku menyebabkan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berjalan efektif;

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP, kendala yang dihadapi adalah belum seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM maupun dukungan sistem. Selain itu, pemahaman terhadap substansi rekomendasi evaluasi masih perlu ditingkatkan agar tindak lanjut yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SAKIP.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan yang terselesaikan	Sebagai penunjang dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, apabila kegiatan tersebut tidak ada maka dokumen – dokumen tidak dapat tersusun

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan	Sebagai penunjang dalam penyusunan dokumen perencanaan keuangan dan evaluasi, apabila kegiatan tersebut tidak ada maka dokumen – dokumen tidak dapat tersusun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Sebagai penunjang dalam mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana dalam mewujudkan dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan yang akuntabel
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang disediakan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sangat efektif dalam menunjang keberhasilan kinerja sasaran, karena program ini merupakan program rutin yang harus ada dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran. Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi adalah sebesar Rp. 7.190.767.279,37 dengan realisasi sebesar Rp.6.435.976.037,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.1.6

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Terintegrasi

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi	91,59%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.190.767.279,37	6.435.976.037,00	90%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.920.000,00	8.384.800,00	17,87
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.114.800,00	82,30%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.920.000,00	4.270.000,00	10,19%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.171.701.025,37	5.005.816.786,00	96,79%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.064.932.718,00	4.913.259.786,00	97,01%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	103.768.307,37	90.717.000,00	87,42%
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	1.840.000,00	61,33%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.620.554,00	106.671.831,00	90,69%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.729.050,00	1.650.700,00	95,47%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.643.200,00	14.782.940,00	75,26%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.175.450,00	702.500,00	59,76%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.847.250,00	1.754.100,00	94,96%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.375.600,00	8.644.200,00	83,31%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.850.004,00	79.137.391,00	95,52%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.021.000,00	17.990.000,00	3,86%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	466.021.000,00	17.990.000,00	3,86%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.603.200,00	997.615.020,00	93,88%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	142.147.055,00	83,62%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.603.200,00	855.467.965,00	95,84%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.901.500,00	299.497.600,00	91,90%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.378.500,00	32.919.500,00	89,60%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.163.000,00	99.910.100,00	91,52%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	37.600.000,00	75,20%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	129.068.000,00	99,28%
Tingkat efisiensi						98,26%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 91,59% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 90%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi dengan nilai efisiensi sebesar 98,26%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 98,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan sangat mendekati pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Tingkat efisiensi tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah disusun secara cermat dan realistis, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa terjadi pemborosan yang signifikan. Selisih sebesar 1,74% dari total anggaran yang direncanakan menunjukkan adanya sisa anggaran yang relatif kecil, yang mengindikasikan adanya pengendalian belanja yang efektif dan efisien.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 98,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengalokasian, dan pemanfaatan tenaga kerja telah dilaksanakan secara optimal dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Tingkat efisiensi tersebut mencerminkan kemampuan unit kerja dalam meminimalkan pemborosan waktu kerja, meningkatkan produktivitas individu maupun tim, serta memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Selain itu, implementasi sistem pengendalian kinerja dan pemantauan beban kerja turut berkontribusi signifikan terhadap pencapaian hasil tersebut.

Dengan mempertimbangkan capaian efisiensi yang sangat tinggi, organisasi dinilai telah berhasil menjaga keseimbangan antara kualitas output dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Ke depan, upaya peningkatan kompetensi, optimalisasi proses kerja, serta penguatan sistem evaluasi kinerja akan terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat efisiensi SDM secara berkelanjutan.

3. Efisiensi Waktu

Tingkat efisiensi sebesar 98,26% mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan alokasi waktu pada setiap tahapan proses kerja, meminimalkan keterlambatan, serta memastikan penyelesaian tugas sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Penerapan mekanisme pengendalian jadwal, pemantauan progres pekerjaan, dan koordinasi antarunit kerja turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja waktu yang optimal.

2. Sasaran Meningkatkatnya Kualitas Insfrastruktur Sumber Daya Air

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kualitas insfrastruktur Sumber Daya Air diukur melalui persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian kinerja / Capaian kinerja sebesar 84,65% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.2.1

Realisasi Kinerja Sasaran II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkannya kualitas insfrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi Kabupaten - Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan - Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di Kabupaten Blitar	68,08	57,63	84,65
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						84,65%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas, indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2025 terealisasi sebesar 57,63% dari target yang ditetapkan sebesar 68,08%. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi irigasi kabupaten dalam kondisi baik belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu tindak lanjut untuk perbaikan.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatkatnya kualitas insfrastruktur Sumber Daya Air mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan kinerja ini disebabkan adanya pengurangan dana transfer melalui dana DAK dikarenakan efisiensi anggaran, sehingga kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, hal ini

berpengaruh sekali terhadap kinerja dari sasaran ini. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.2.2
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur Sumber Daya Air

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi Kabupaten - Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan - Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di Kabupaten Blitar	68,08	57,63	67,1	59,34

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 80,18% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.2.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur Sumber Daya Air Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatkannya kualitas	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap	71,88	57,63	80,18%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
	infrastruktur SDA		panjang saluran irigasi Kabupaten - Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di Kabupaten Blitar			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.2.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi Kabupaten - Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan - Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di Kabupaten Blitar	57,63	63,4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang

diharapkan. Meskipun belum seluruh jaringan irigasi dalam kondisi baik, namun Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, maupun operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pada tahun 2025 telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 15,3 km. Infrastruktur irigasi yang baik dan memadai dapat memastikan ketersediaan air pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa segmen jaringan irigasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan berkelanjutan agar kinerja sistem irigasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur SDA adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang berakibat tidak adanya dana transfer ke daerah melalui dana DAK, dimana dana tersebut sesuai dengan rencana dialokasikan ke sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, hal ini berakibat tidak tercapainya volume jaringan irigasi yang direhabilitasi;
- b. Proses pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan pada tribulan akhir yang berakibat pada minimnya proses pencairan keuangan dan progress kegiatan fisik yang terlambat.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan Kualitas Insfrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penujang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan pengaman sungai WS yang dikelola	Sebagai penunjang/mendukung tercapainya bangunan pengaman sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Sebagai penunjang dalam pencapaian indikator sasaran yang harus disertai oleh anggaran dan sumber daya baik manusia maupun alatnya

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan program yang sangat efektif dalam pencapaian sasaran, karena dengan adanya program ini pemenuhan kualitas jaringan irigasi dapat tercapai yang bermanfaat untuk ketahanan pangan. Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas insfrastruktur SDA adalah sebesar Rp.16.202.881.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.804.497.836,30 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.2.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Yang Terintegrasi

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA	84,65%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.202.881.400,00	9.804.497.836,30	61%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	224.138.050,00	191.013.000,00	85,22%
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	224.138.050,00	191.013.000,00	85,22%
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.978.743.350,00	9.613.484.836,30	60,16%
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	15.959.583.350,00	9.613.484.836,30	60,24%
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	19.160.000,00	-	0,00%
			Tingkat efisiensi			72,06%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur SDA, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 84,65% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 61%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 72,06%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 72,06%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya keuangan telah dilaksanakan secara terkendali dan sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi.

Tingkat efisiensi tersebut mencerminkan upaya pengelolaan anggaran yang berorientasi pada prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap tahapan perencanaan maupun realisasi belanja. Pelaksanaan pengendalian biaya, penyesuaian terhadap kebutuhan operasional, serta pemantauan realisasi anggaran secara berkala menjadi faktor pendukung dalam pencapaian efisiensi tersebut.

Dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh, organisasi akan terus melakukan penyempurnaan dalam perencanaan anggaran, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kualitas evaluasi pelaksanaan program guna mendorong tingkat efisiensi anggaran yang lebih optimal pada periode berikutnya.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 72,06%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tenaga kerja telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi sesuai kebutuhan organisasi.

Tingkat efisiensi tersebut mencerminkan adanya upaya dalam menyesuaikan alokasi tenaga kerja dengan beban kerja yang ada, meningkatkan koordinasi antar unit, serta mengendalikan penggunaan waktu kerja secara lebih terarah. Implementasi mekanisme perencanaan kebutuhan SDM, pemantauan kinerja, dan penguatan fungsi pengawasan menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja efisiensi tersebut.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, perlu adanya optimalisasi distribusi beban kerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta penyempurnaan sistem evaluasi kinerja guna

mendorong tingkat efisiensi SDM yang lebih optimal pada periode berikutnya.

3. Efisiensi Waktu

apaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu kerja telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat deviasi antara perencanaan jadwal dan realisasi pelaksanaan yang perlu dioptimalkan.

Tingkat efisiensi tersebut mencerminkan upaya organisasi dalam mengendalikan durasi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, serta meminimalkan potensi keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Penerapan mekanisme pemantauan progres pekerjaan dan pengendalian jadwal secara berkala menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja efisiensi waktu tersebut.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Minum

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum diukur melalui Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman dengan capaian kinerja sebesar 99,87% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.3.1
Realisasi Kinerja Sasaran III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar - Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	90,84	90,72	99,87

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
			jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						99,87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, indikator persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90,72% dari target yang ditetapkan sebesar 90,84%. Pencapaian SPM bidang air minum Kabupaten Blitar yang melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM sebanyak 324 RT yang terdiri dari jaringan perpipaan sebanyak 324 RT dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 0 RT. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.3.2

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar - Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap	90,84	90,72	90,64	84,17

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
			air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 98,62% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.3.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar - Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk	91,99	90,72	98,62%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.3.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar - Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk	90,72	95,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Target akses air minum layak dan aman sebesar 90,84%, namun realisasi tahun 2025 sebesar 90,64%. Hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan perluasan yang belum mencapai target sehingga capaian program tersebut belum dapat mencapai 100% karena fokus pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah perbaikan sarana sistem jaringan perpipaannya, bukan pada perluasannya

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut

tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang berakibat tidak adanya dana transfer ke daerah melalui dana DAK, hal ini berakibat tidak tercapainya volume sambungan rumah tangga yang dapat diperluas maupun ditingkatkan;
- b. Proses pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan pada tribulan akhir yang berakibat pada minimnya proses pencairan keuangan dan progress kegiatan fisik yang terlambat.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Sebagai penunjang/ mendukung tercapainya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum merupakan program yang termasuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga program ini sangat efektif dalam menunjang kinerja sasaran dinas. Adapun realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum adalah sebesar Rp.16.202.881.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.804.497.836,30 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.3.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	99,87%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29%
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29%
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	84.470.000,00	-	0,00%
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.278.781.420,00	1.226.662.000,00	95,92%
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.852.700.250,00	3.416.136.500	88,67%
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.450.000.000,00	1.375.885.000,00	94,89%
			Tingkat efisiensi			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99,87% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 90,29%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 90,41%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 90,41%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi telah dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi, dengan tingkat kesesuaian yang tinggi antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi anggaran tercermin dari penggunaan belanja yang terkendali dan berorientasi pada prioritas program, sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 72,06%. Efisiensi SDM ditunjukkan melalui pengalokasian tenaga kerja yang proporsional terhadap beban kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan mekanisme pemantauan kinerja.

3. Efisiensi Waktu

Sementara itu, efisiensi waktu tercapai melalui pengelolaan jadwal kegiatan yang efektif, koordinasi pelaksanaan yang baik, serta penyelesaian tugas sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Limbah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah diukur melalui persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman dengan capaian kinerja sebesar 96,74% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.4.1
Realisasi Kinerja Sasaran IV

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik dengan jumlah RT di Kabupaten Blitar - jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat (off-site) maupun sistem setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk	93,50	90,45	96,74
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						96,74%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.4.1 diatas, indikator persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90,45% dari target yang ditetapkan sebesar 93,5%. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana DAK Sanitasi pada tahun 2025 karena efisiensi, sehingga dana DAU yang ada dimaksimalkan untuk pemenuhan akses sanitasi layak dan aman. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.4.2

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik dengan jumlah RT di Kabupaten Blitar <ul style="list-style-type: none"> - jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat (off-site) maupun sistem setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk 	93,50	90,45	90,64	84,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 91,18% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.4.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik dengan jumlah RT di Kabupaten Blitar - jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat (off-site) maupun sistem setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk	99,2	90,45	91,18%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.4.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	Perbandingan jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik dengan jumlah RT di Kabupaten Blitar <ul style="list-style-type: none"> - jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat (off-site) maupun sistem setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku - Jumlah penduduk Kab Blitar adalah jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk 	90,45	88,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Dalam mewujudkan akses sanitasi layak dan aman, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan lintas OPD seperti Dinas Kesehatan. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses Sanitasi Aman.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang berakibat tidak adanya dana transfer ke daerah melalui dana DAK, hal ini berakibat tidak tercapainya volume sambungan rumah tangga yang dapat diperluas maupun ditingkatkan;
- b. Proses pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan pada tribulan akhir yang berakibat pada minimnya proses pencairan keuangan dan progress kegiatan fisik yang terlambat.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air limbah

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Sebagai penunjang/ mendukung tercapainya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air limbah secara layak dan aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sangat efektif dalam menunjang kinerja sasaran dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Realisasi kinerja diatas didukung

oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah adalah sebesar Rp. 4.363.918.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.965.218.646,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.4.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	96,74%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95%
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95%
			Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95%
Tingkat efisiensi						70,24%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 96,74% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 67,95%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 70,24%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 70,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran tercermin dari upaya pengendalian belanja sesuai prioritas program dan kebutuhan operasional.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 70,24%. Efisiensi SDM ditunjukkan melalui pengalokasian tenaga kerja yang proporsional terhadap beban kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan mekanisme pemantauan kinerja.

3. Efisiensi Waktu

Sementara itu, efisiensi waktu tercapai melalui pengelolaan jadwal kegiatan yang efektif, koordinasi pelaksanaan yang baik, serta penyelesaian tugas sesuai target waktu yang telah ditetapkan, meskipun masih adanya kendala kurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pemenuhan administrasi, karena pelaksanaan kegiatan yang terlalu mepet.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten diukur melalui Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 710,45% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.5.1**Realisasi Kinerja Sasaran V**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah PBG dan SLF yang sesuai peruntukannya dengan jumlah seluruh pengajuan PBG dan SLF - Jumlah PBG dan SLF yang sesuai peruntukannya adalah jumlah PBG yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan - Jumlah PBG yang berlaku adalah jumlah total pengajuan PBG dan SLF	6,60	46,89	710,45
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						710,45%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.5.1 diatas, indikator persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota pada tahun 2025 terealisasi sebesar 46,89% dari target yang ditetapkan sebesar 6,6%. Data tersebut diperoleh dari perbandingan rekom PBG dan SLF yang telah terbit dengan jumlah total pengajuan pada tahun berkenaan. Hal ini jauh melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6,6, dimana target tersebut diperoleh dengan penyebut yang lebih besar yang merupakan data dari tahun ke tahun.. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.5.2

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	6,60	46,89	6,4	57,6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 91,18% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.5.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah PBG dan SLF yang sesuai peruntukannya dengan jumlah seluruh pengajuan PBG dan SLF <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PBG dan SLF yang sesuai peruntukannya adalah jumlah PBG yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan - Jumlah PBG yang berlaku adalah jumlah total pengajuan PBG dan SLF 	7,4	46,89	633,65%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.5.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah PBG dan SLF yang sesuai peruntukannya dengan jumlah seluruh pengajuan PBG dan SLF - Jumlah PBG dan SLF yang sesuai peruntukannya adalah jumlah PBG yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan - Jumlah PBG yang berlaku adalah jumlah total pengajuan PBG dan SLF	46,89	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan, yaitu dengan lebih optimal dalam pendampingan pengajuan ijin PBG dan SLF sehingga para pemohon dapat dengan mudah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dalam aplikasi SIMBG.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pengajuan permohonan ijin yang belum sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan;
- b. Proses pelaksanaan kegiatan monitoring atau cek lapangan mengalami kendala dikarenakan SDM yang belum mencukupi dan belum memiliki sertifikat keahlian.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik	Sebagai penunjang/mendukung terhitungnya kondisi jumlah gedung Kabupaten
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya	Sebagai penunjang/mendukung terhitungnya kondisi jumlah gedung Kabupaten yang sesuai dengan sistem penataan yang berlaku
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan tenaga konstruksi yang terampil	Sebagai penunjang/mendukung peningkatan kapasitas bagi tenaga konstruksi di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Penataan Bangunan Gedung sangat efektif dalam menunjang kinerja sasaran untuk kualitas gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya sangat efektif dalam pemenuhan kinerja sasaran dalam hal perizinan dan penataan bangunan gedung, sedangkan untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi merupakan program pendukung dalam memenuhi target kinerja sasaran. Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang

digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah sebesar Rp. 8.497.482.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.953.163.837,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.5.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	710,45 %	Program Penataan Bangunan Gedung	8.286.344.900,00	7.750.664.113,00	93,54%
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.286.344.900,00	7.750.664.113,00	93,54%
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.064.579.876,00	7.556.020.113,00	93,69%
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,	221.765.024,00	194.644.000,00	87,77%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG			
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	103.191.200,00	101.271.600,00	98,14%
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	103.191.200,00	101.271.600,00	98,14%
			Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	103.191.200,00	101.271.600,00	98,14%
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
			Tingkat efisiensi			13,17%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 710,45% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,59%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 13,17%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 13,17%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Efisiensi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan keterpaduan antara perencanaan dan realisasi belanja.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 13,17%. Pemanfaatan SDM masih memerlukan penyesuaian dalam distribusi beban kerja dan peningkatan produktivitas.

3. Efisiensi Waktu

Sementara itu, pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala dalam pengendalian jadwal dan ketepatan penyelesaian tugas.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan diukur melalui tingkat kemantapan jalan Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 100,55% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.6.1

Realisasi Kinerja Sasaran VI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah persentase jalan kondisi baik dan jalan kondisi sedang - Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan tingkat kerusakan ≤ 6 %; - Jalan kondisi sedang adalah jalan dengan tingkat kerusakan antara 10-40%	80,18	80,62	100,55
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						100,55%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.6.1 diatas, indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2025 terealisasi sebesar 80,62% dari target yang ditetapkan sebesar 80,18%. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.6.2

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah persentase jalan kondisi baik dan jalan kondisi sedang - Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan tingkat kerusakan ≤ 6 %; - Jalan kondisi sedang adalah jalan dengan tingkat kerusakan antara 10-40%	80,18	80,62	79,68	79,8

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 100,09% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.6.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah persentase jalan kondisi baik dan jalan kondisi sedang - Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan	82,68	80,62	97.51%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
			tingkat kerusakan ≤ 6 %; Jalan kondisi sedang adalah jalan dengan tingkat kerusakan antara 10-40%			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.6.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah persentase jalan kondisi baik dan jalan kondisi sedang - Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan tingkat kerusakan ≤ 6 %; - Jalan kondisi sedang adalah jalan dengan tingkat kerusakan antara 10-40%	80,62	89,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan telah dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi jalan yang mantap tersebut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pencapaian target ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam

meningkatkan pelayanan publik di bidang infrastruktur serta menjadi dasar untuk terus mendorong peningkatan kemantapan jalan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan kemantapan tersebut mencerminkan hasil dari pelaksanaan program pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan yang telah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun demikian, di tengah capaian positif tersebut, masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kondisi kemantapan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya beban lalu lintas, kondisi cuaca, usia perkerasan jalan, serta keterbatasan penanganan pada ruas-ruas tertentu.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang berakibat tidak adanya dana transfer ke daerah melalui dana DAK;
- b. Proses pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan pada tribulan akhir yang berakibat pada minimnya proses pencairan keuangan dan progress kegiatan fisik yang terlambat.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jalan kabupaten yang ditangani	Sebagai penunjang tercapainya panjang jalan yang ditangani dan berpengaruh terhadap kondisi jalan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Sebagai penunjang tercapainya panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan berpengaruh terhadap kondisi jalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase sangat efektif dalam menunjang keberhasilan kinerja sasaran, karena penanganan jalan Kabupaten dilaksanakan dengan anggaran dari dua (2) program tersebut. Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan adalah sebesar Rp.159.542.334.834,93,00 dengan realisasi sebesar Rp.65.138.943.557,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.6.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	96,74%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82%
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82%
			Pembangunan Jalan	23.695.213.975,00	4.968.589.309,00	20,97%
			Pemeliharaan Berkala Jalan	85.779.820.329,00	23.025.180.700,00	26,84%
			Rehabilitasi Jembatan	1.404.271.000,00	939.873.750,00	66,93%
			Pembangunan Jembatan	604.710.000,00	203.075.600,00	33,58%
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	4.502.664.500,00	1.374.601.552,00	30,53%
			Rehabilitasi Jalan	9.440.044.604,00	6.448.003.400,00	68,30%
			Pemeliharaan Rutin Jalan	13.232.394.057,93	11.318.295.924,00	85,53%
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
Tingkat efisiensi						40,6%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,55% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 40,82%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 40,6%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 40,6%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, namun pemanfaatannya belum optimal dan masih memerlukan peningkatan keselarasan antara perencanaan dan realisasi belanja.

Efisiensi anggaran mencerminkan adanya upaya pengendalian biaya dan prioritas penggunaan dana sesuai kebutuhan program, meskipun ketepatan alokasi serta efektivitas realisasi anggaran masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi anggaran secara berkala telah dilakukan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, organisasi akan melakukan penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas evaluasi pelaksanaan program guna mendorong tingkat efisiensi anggaran yang lebih optimal pada periode pelaporan berikutnya..

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 40,6%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja telah mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, namun belum optimal dan masih memerlukan peningkatan kesesuaian antara alokasi SDM dan kebutuhan beban kerja.

Efisiensi SDM mencerminkan adanya upaya pengelolaan tenaga kerja melalui penyesuaian penugasan, pemantauan kinerja, serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, distribusi beban kerja, produktivitas, dan efektivitas pemanfaatan waktu kerja masih perlu ditingkatkan guna mendukung pencapaian kinerja secara lebih optimal.

3. Efisiensi Waktu

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan telah berjalan, namun belum optimal dalam mendukung ketepatan jadwal dan penyelesaian tugas sesuai perencanaan. Efisiensi waktu mencerminkan adanya upaya pengendalian durasi pelaksanaan kegiatan serta koordinasi antarunit kerja, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan jadwal, pemantauan progres, dan pengendalian keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Hal

tersebut menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

7. Sasaran Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang diukur melalui persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang dengan capaian kinerja sebesar 81,7% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7.1

Realisasi Kinerja Sasaran VII

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Perbandingan Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang dibagi jumlah pengajuan pemanfaatan ruang - Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK - Jumlah pengajuan pemanfaatn ruang adalah jumlah pengajuan yang masuk dalam sistem KRK	90	73,53	81,7
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						81,7%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.7.1 diatas, indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang pada tahun 2025 terealisasi sebesar 73,53% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pengajuan KKPR dengan jumlah penerbitan persetujuan KKPR. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blitar sudah mempedomani dan mengacu pada Perda

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam proses pemanfaatan ruang khususnya terkait perijinan di Kabupaten Blitar terdapat mekanisme pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.7.2

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Perbandingan Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang dibagi jumlah pengajuan pemanfaatan ruang - Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK - Jumlah pengajuan pemanfaatan ruang adalah jumlah pengajuan yang masuk dalam sistem KRK	90	73,53	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 91,18% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.7.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Perbandingan Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang dibagi jumlah pengajuan pemanfaatan ruang - Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK - Jumlah pengajuan pemanfaatan ruang adalah jumlah pengajuan yang masuk dalam sistem KRK	90	73,53	81,7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.7.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Perbandingan Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang dibagi jumlah pengajuan pemanfaatan ruang - Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK - Jumlah pengajuan pemanfaatan ruang adalah jumlah pengajuan yang masuk dalam sistem KRK	73,53	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Dalam mewujudkan persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang, tidak hanya bergantung pada pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar namun juga adanya kolaborasi dengan dinas lain, dalam proses pemanfaatan ruang khususnya terkait perijinan di Kabupaten Blitar terdapat mekanisme pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian

sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Proses penyusunan RDTR dan RTRW masih dalam tahap pendampingan teknis sehingga RDTR yang diajukan belum bisa dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi masyarakat untuk melakukan permohonan KKPR maupun untuk menyetujuinya, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sebagai pemberi rekomendasi.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW dan RRTR Kabupaten /Kota yang ditetapkan	Sebagai penunjang/ mendukung dalam penetapan RRTR dan RTRW
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koordinasi perencanaan tata ruang	Sebagai penunjang dalam proses pendampingan teknis untuk penyusunan RRTR dan RTRW

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sangat efektif dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran, karena proses pelaksanaan persetujuan dan koordinasi terkait tata ruang

hanya dilaksanakan satu (1) program tersebut. Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar Rp. 2.298.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.562.163,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.7.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,7%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.298.000.000,00	1.820.562.163,00	79%
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.190.000.000,00	1.722.121.431,00	78,64%
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	846.000.000,00	562.155.250,00	66,45%
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.344.000.000,00	1.159.966.181,00	86,31%
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000,00	98.440.732,00	91,15%
			Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	49.500.000,00	47.829.289,00	96,62%
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	58.500.000,00	50.611.443,00	86,52%
			Tingkat Efisiensi			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 81,7% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 79%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 96,69%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode pelaporan, tingkat efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar 96,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara sangat efektif dan terkendali, dengan tingkat kesesuaian yang tinggi antara perencanaan dan realisasi belanja dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Efisiensi anggaran tercermin dari ketepatan alokasi sumber daya keuangan sesuai prioritas program, optimalisasi pemanfaatan dana, serta pelaksanaan pengendalian biaya yang konsisten. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala turut memperkuat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan.

Dengan capaian efisiensi yang sangat tinggi tersebut, organisasi dinilai mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan program dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Ke depan, upaya penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas evaluasi pelaksanaan program akan terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan efisiensi anggaran secara berkelanjutan.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 96,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tenaga kerja telah dilaksanakan secara sangat efektif, dengan tingkat kesesuaian yang tinggi antara alokasi SDM dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi SDM tercermin dari optimalisasi distribusi beban kerja, peningkatan produktivitas pegawai, serta penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja secara konsisten. Koordinasi pelaksanaan tugas yang baik serta pemanfaatan waktu kerja yang optimal turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang efisien.

Dengan capaian efisiensi yang sangat tinggi tersebut, organisasi dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kualitas output dan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia. Ke depan, organisasi akan terus melakukan penguatan pengembangan kompetensi, penyempurnaan perencanaan kebutuhan SDM, serta peningkatan kualitas sistem evaluasi kinerja guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat efisiensi SDM secara berkelanjutan.

3. Efisiensi Waktu

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode pelaporan, tingkat efisiensi waktu tercatat sebesar 96,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara sangat efektif, dengan tingkat kesesuaian yang tinggi antara perencanaan jadwal dan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi waktu tercermin dari ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan, optimalisasi durasi pelaksanaan pekerjaan, serta koordinasi antarunit kerja yang berjalan secara

efektif. Penerapan mekanisme pemantauan progres kegiatan dan pengendalian jadwal secara berkala turut berkontribusi terhadap pencapaian efisiensi waktu yang optimal.

Dengan capaian efisiensi waktu yang sangat tinggi tersebut, organisasi dinilai mampu menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Ke depan, organisasi akan terus melakukan penyempurnaan perencanaan waktu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi manajemen waktu guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat efisiensi waktu secara berkelanjutan.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persampahan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan diukur melalui cakupan area pelayanan persampahan dengan capaian kinerja sebesar 165,22% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.8.1

Realisasi Kinerja Sasaran VIII

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan	Perbandingan Luas area pelayanan persampahan adalah jumlah total luas wilayah (desa/ dusun) yang sudah dibangun TPS/TPA/TP3R di Kabupaten Blitar dengan Luas area Kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah Kabupaten	19,15	31,64	165,22
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						165,22%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.8.1 diatas, indikator cakupan area pelayanan persampahan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 31,64% dari target yang ditetapkan sebesar 19,15%. Indikator ini dapat

teralisasi melebihi target yang telah ditetapkan yang berarti area layanan persampahan di Kabupaten Blitar telah dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.8.2

Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persampahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan	Perbandingan Luas area pelayanan persampahan adalah jumlah total luas wilayah (desa/ dusun) yang sudah dibangun TPS/TPA/TP3R di Kabupaten Blitar dengan Luas area Kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah Kabupaten	19,15	31,64	30	19,15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 165,22% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.8.3

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan	Perbandingan Luas area pelayanan persampahan adalah jumlah total luas wilayah (desa/ dusun) yang sudah dibangun	19,15	31,64	165,22

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
			TPS/TPA/TP3R di Kabupaten Blitar dengan Luas area Kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah Kabupaten			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.8.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan	Perbandingan Luas area pelayanan persampahan adalah jumlah total luas wilayah (desa/ dusun) yang sudah dibangun TPS/TPA/TP3R di Kabupaten Blitar dengan Luas area Kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah Kabupaten	31,64	70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Dalam mewujudkan cakupan area pelayanan persampahan, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan lintas OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup. Dukungan,

komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur persampahan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang berakibat pada pengurangan anggaran khususnya untuk pengelolaan persampahan;
- b. Program pengelolaan persampahan menjadi program yang hanya sebagai pendukung saja sehingga prioritas pembangunan belum mengarah ke program tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan Kualitas infrastruktur persampahan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan area pelayanan persampahan	Sebagai penunjang/mendukung tercapainya infrastruktur persampahan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional merupakan program yang efektif dalam mendukung kinerja sasaran karena melalui program ini pemenuhan infrastruktur persampahan dapat terbangun. Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan adalah sebesar Rp. 250.981.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 238.157.000,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran :

Tabel 3.8.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	165,22 %	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89%
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89%
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89%
Tingkat efisiensi						57,43%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 165,22% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,89%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dengan nilai efisiensi sebesar 57,43%.

Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode pelaporan, tingkat efisiensi anggaran tercapai sebesar 57,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran tercermin dari upaya pengendalian belanja sesuai prioritas program dan kebutuhan operasional.

2. Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional periode pelaporan, tingkat efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) tercatat sebesar 57,43%. Efisiensi SDM ditunjukkan melalui pengalokasian tenaga kerja yang proporsional terhadap beban kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan mekanisme pemantauan kinerja.

3. Efisiensi Waktu

Sementara itu, efisiensi waktu tercapai melalui pengelolaan jadwal kegiatan yang efektif, koordinasi pelaksanaan yang baik, serta penyelesaian tugas sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

9. Sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Perubahan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Perubahan ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.9.1

**Realisasi Kinerja Sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025
sebelum Perubahan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	Jumlah sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar dibagi sarana perkantoran dan publik yang menjadi kewenangan Kabupaten dikali 100 - Sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar adalah sarana perkantoran dan publik yang harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunannya - sarana perkantoran publik yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah jumlah sarana perkantoran dan publik yang menjadi aset Kabupaten	47	23,1	49,15
		Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah IMB yang berlaku dikali 100 - Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya adalah jumlah IMB yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan - Jumlah IMB yang berlaku adalah	1,54	6,32	410,39

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian
			jumlah total pengajuan IMB			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						229,77%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang drainase di Kabupaten dikali 100 - Panjang saluran drainase dalam kondisi baik adalah panjang saluran drainase yang berfungsi secara optimal untuk mengalirkan air buangan maupun air hujan sehingga tidak terjadi genangan - Panjang drainase di Kabupaten adalah saluran drainase di sisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten	79,11	80,3	101,5
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						101,5%
3	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah penyedia jasa Konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah penyedia jasa konstruksi di kabupaten	53,6	44,54	83,1
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						83,1%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.9.1 diatas, indikator persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar pada tahun 2025 terealisasi sebesar 23,1% dari target yang ditetapkan sebesar 47%. Indikator ini belum dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dikarenakan belum adanya survei kondisi gedung Kabupaten, sehingga perolehan angka tersebut merupakan realisasi pada Tahun 2022. Rasio Kepatuhan IMB dapat terealisasi

melebihi target yang ditetapkan karena banyaknya animo masyarakat dalam hal pengajuan perizinan PBG/ IMB. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat juga dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan, hal ini berkaitan erat dengan adanya anggaran yang mencukupi kebutuhan pemenuhan saluran drainase pada jalan Kabupaten. Pada indikator persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat masih dibawah target yang ditetapkan karena adanya penurunan jumlah peserta pelatihan dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025 :

Tabel 3.9.2

Perkembangan Kinerja Sasaran Sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	Jumlah sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar dibagi sarana perkantoran dan publik yang menjadi kewenangan Kabupaten dikali 100 <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar adalah sarana perkantoran dan publik yang harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunannya - sarana perkantoran publik yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah jumlah sarana perkantoran dan publik yang menjadi aset Kabupaten 	47	23,1	30	19,15

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi		
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rasio Kepatuhan IMB	<p>Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah IMB yang berlaku dikali 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya adalah jumlah IMB yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan - Jumlah IMB yang berlaku adalah jumlah total pengajuan IMB 	1,54	6,32	6,4	6,3
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	<p>Jumlah Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang drainase di Kabupaten dikali 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang saluran drainase dalam kondisi baik adalah panjang saluran drainase yang berfungsi secara optimal untuk mengalirkan air buangan maupun air hujan sehingga tidak terjadi genangan - Panjang drainase di Kabupaten adalah saluran drainase di sisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten 	79,11	80,3	81,8	76,69
3	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah penyedia jasa Konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah penyedia jasa konstruksi di kabupaten	53,6	44,54	38,3	38,3

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.9.3

Pencapaian kinerja Sasaran Sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	Jumlah sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar dibagi sarana perkantoran dan publik yang menjadi kewenangan Kabupaten dikali 100 <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar adalah sarana perkantoran dan publik yang harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunannya - sarana perkantoran publik yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah jumlah sarana perkantoran dan publik yang menjadi aset Kabupaten 	64,4	23,1	35,87
		Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah IMB yang berlaku dikali 100 <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya adalah jumlah IMB yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan 	12,73	6,32	49,65

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
			Jumlah IMB yang berlaku adalah jumlah total pengajuan IMB			
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang drainase di Kabupaten dikali 100 - Panjang saluran drainase dalam kondisi baik adalah panjang saluran drainase yang berfungsi secara optimal untuk mengalirkan air buangan maupun air hujan sehingga tidak terjadi genangan Panjang drainase di Kabupaten adalah saluran drainase di sisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten	76,26	80,3	105,3
2	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah penyedia jasa Konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah penyedia jasa konstruksi di kabupaten	72,7	44,54	61,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Dari beberapa indikator tersebut rata-rata belum dapat mencapai target pada akhir Renstra, hanya pada pemenuhan drainase dalam kondisi baik yang dapat memenuhi target. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.9.4

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Terwujudnya peningkatan kualitas	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	Jumlah sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar dibagi sarana	23,1	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
	bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)		<p>perkantoran dan publik yang menjadi kewenangan Kabupaten dikali 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar adalah sarana perkantoran dan publik yang harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunannya - sarana perkantoran publik yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah jumlah sarana perkantoran dan publik yang menjadi aset Kabupaten 		
		Rasio Kepatuhan IMB	<p>Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah IMB yang berlaku dikali 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya adalah jumlah IMB yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan <p>Jumlah IMB yang berlaku adalah jumlah total pengajuan IMB</p>	6,32	10
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	<p>Jumlah Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang drainase di Kabupaten dikali 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang saluran drainase dalam kondisi baik adalah panjang saluran drainase yang berfungsi secara optimal untuk mengalirkan air buangan maupun air hujan sehingga tidak terjadi genangan <p>Panjang drainase di Kabupaten adalah saluran drainase di sisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten</p>	80,3	76 (Kab. Jember)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
3	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah penyedia jasa Konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah penyedia jasa konstruksi di kabupaten	44,54	30 (Jatim)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Dalam mewujudkan sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan rehabilitasi gedung-gedung perkantoran di wilayah Kabupaten Blitar. Namun untuk identifikasi kondisi gedung-gedung tersebut belum dapat dilaksanakan karena kurangnya alokasi anggaran, sehingga kondisi gedung belum dapat terupdate untuk data konkritnya. Adapun rasio kepatuhan IMB dari seluruh data selama 3 tahun terakhir masih sangat minim, karena banyaknya jumlah pemohon pengajuan IMB(PBG).

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang berakibat pada kurang maksimal dan optimalnya pelaksanaan kegiatan;
- b. Lemahnya proses updating data sehingga data-data yang ada belum diperbaharui secara *up to date*.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Perubahan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penujang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik	Sebagai penunjang/mendukung terhitungnya jumlah gedung Kabupaten
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Sebagai penunjang tercapainya panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan berpengaruh terhadap kondisi jalan
Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan tenaga konstruksi yang terampil	Sebagai penunjang/mendukung peningkatan kapasitas bagi tenaga konstruksi di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut :

Tabel 3.9.6

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Perubahan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	229,77%	Program Penataan Bangunan Gedung	8.286.344.900,00	7.750.664.113,00	93,54%
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.286.344.900,00	7.750.664.113,00	93,54%
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.064.579.876,00	7.556.020.113,00	93,69%
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	221.765.024,00	194.644.000,00	87,77%
			Tingkat efisiensi			40,71%
2	Meningkatnya kualitas	101,5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
	infrastruktur jalan		PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
			Tingkat efisiensi			83,45%
3	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	83,1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
			Tingkat efisiensi			112,85 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran – sasaran tersebut. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran

tercermin dari upaya pengendalian belanja sesuai prioritas program dan kebutuhan operasional.

2. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM ditunjukkan melalui pengalokasian tenaga kerja yang proporsional terhadap beban kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan mekanisme pemantauan kinerja.

3. Efisiensi Waktu

Sementara itu, efisiensi waktu tercapai melalui pengelolaan jadwal kegiatan yang efektif, koordinasi pelaksanaan yang baik, serta penyelesaian tugas sesuai target waktu yang telah ditetapkan, meskipun masih adanya kendala kurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pemenuhan administrasi, karena pelaksanaan kegiatan yang terlalu mepet

B. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.190.767.279,37	6.435.976.037,00	90%
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.920.000,00	8.384.800,00	17,87
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.114.800,00	82,30%
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.920.000,00	4.270.000,00	10,19%
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.171.701.025,37	5.005.816.786,00	96,79%
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.064.932.718,00	4.913.259.786,00	97,01%
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	103.768.307,37	90.717.000,00	87,42%
1.2.3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	1.840.000,00	61,33%
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.620.554,00	106.671.831,00	90,69%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.729.050,00	1.650.700,00	95,47%
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.643.200,00	14.782.940,00	75,26%
1.3.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.175.450,00	702.500,00	59,76%
1.3.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.847.250,00	1.754.100,00	94,96%
1.3.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.375.600,00	8.644.200,00	83,31%
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.850.004,00	79.137.391,00	95,52%
1.4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	466.021.000,00	17.990.000,00	3,86%
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	466.021.000,00	17.990.000,00	3,86%
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.603.200,00	997.615.020,00	93,88%
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	142.147.055,00	83,62%
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.603.200,00	855.467.965,00	95,84%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.901.500,00	299.497.600,00	91,90%
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.378.500,00	32.919.500,00	89,60%
1.6.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.163.000,00	99.910.100,00	91,52%
1.6.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	37.600.000,00	75,20%
1.6.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	129.068.000,00	99,28%
2	Meningkatkatnya kualitas infrastruktur SDA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.202.881.400,00	9.804.497.836,30	61%
2.1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	224.138.050,00	191.013.000,00	85,22%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
2.1.2		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	224.138.050,00	191.013.000,00	85,22%
2.2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.978.743.350,00	9.613.484.836,30	60,16%
2.2.1		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	15.959.583.350,00	9.613.484.836,30	60,24%
2.2.2		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	19.160.000,00	-	0,00%
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95%
3.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95%
3.1.1		Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.363.918.000,00	2.965.218.646,00	67,95%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29%
4.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota	6.665.951.670,00	6.018.683.500,00	90,29%
4.1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	84.470.000,00	-	0,00%
4.1.2		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.278.781.420,00	1.226.662.000,00	95,92%
4.1.3		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.852.700.250,00	3.416.136.500	88,67%
4.1.4		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.450.000.000,00	1.375.885.000,00	94,89%
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89%
5.1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
5.1.1		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	250.981.000,00	238.157.000,00	94,89%
6	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.286.344.900,00	7.750.664.113,00	93,54%
6.1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.286.344.900,00	7.750.664.113,00	93,54%
6.1.1		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.064.579.876,00	7.556.020.113,00	93,69%
6.1.2		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	221.765.024,00	194.644.000,00	87,77%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
		Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
7		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	103.191.200,00	101.271.600,00	98,14%
7.1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	103.191.200,00	101.271.600,00	98,14%
7.1.1		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	103.191.200,00	101.271.600,00	98,14%
8		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
8.1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
8.1.1		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	107.946.000,00	101.228.124,00	93,78%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
9.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
9.1.1		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	20.883.216.369,00	16.861.323.322,00	80,47%
10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82%
10.1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	138.659.118.465,93	48.277.620.235,00	34,82%
10.1.1		Pembangunan Jalan	23.695.213.975,00	4.968.589.309,00	20,97%
10.1.2		Pemeliharaan Berkala Jalan	85.779.820.329,00	23.025.180.700,00	26,84%
10.1.3		Rehabilitasi Jembatan	1.404.271.000,00	939.873.750,00	66,93%
10.1.4		Pembangunan Jembatan	604.710.000,00	203.075.600,00	33,58%
10.1.5		Pemeliharaan Berkala Jembatan	4.502.664.500,00	1.374.601.552,00	30,53%
10.1.6		Rehabilitasi Jalan	9.440.044.604,00	6.448.003.400,00	68,30%
10.1.7		Pemeliharaan Rutin Jalan	13.232.394.057,93	11.318.295.924,00	85,53%
11		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.298.000.000,00	1.820.562.163,00	79%
11.1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.190.000.000,00	1.722.121.431,00	78,64%

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
11.1.1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	846.000.000,00	562.155.250,00	66,45%
11.1.2		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.344.000.000,00	1.159.966.181,00	86,31%
11.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000,00	98.440.732,00	91,15%
11.2.1		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	49.500.000,00	47.829.289,00	96,62%
11.2.2		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	58.500.000,00	50.611.443,00	86,52%
		TOTAL	205.012.316.284,30	100.375.202.576,30	48,96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mengelola total anggaran sebesar Rp. 205.102.316.284,30 dengan realisasi sebesar Rp. 100.375.202.576,30 atau 48,96%. Persentase realisasi ini menunjukkan bahwa secara agregat pelaksanaan kegiatan belum optimal, terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada beberapa program strategis. Adapun

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini memiliki tingkat realisasi yang relatif tinggi sebesar 90%, mencerminkan kelancaran pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi dan operasional perangkat daerah. Namun demikian, terdapat sub kegiatan dengan realisasi sangat rendah, yaitu :
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan serapan anggaran sebesar 10,19%. Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan adanya proses administrasi pada belanja jasa video/dokumentasi yang tidak dilaksanakan sesuai target namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kinerja capaian dokumen evaluasi;
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hanya terealisasi 3,86%, mengindikasikan adanya penundaan atau tidak terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin sesuai perencanaan. Hal ini dikarenakan adanya proses administrasi yang tidak dapat terselesaikan sampai dengan batas waktu pencairan sehingga proses pembayarannya akan dilakukan pada tahun anggaran 2026.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Realisasi anggaran program ini mencapai 61%, masih tergolong moderat. Kinerja pelaksanaan cukup baik pada kegiatan pembinaan kelembagaan SDA sebesar 85,22%, namun realisasi menurun signifikan pada kegiatan utama pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, khususnya rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak terealisasi (0%). Hal ini berdampak pada rendahnya capaian keseluruhan program. Kegiatan fisik pada sub kegiatan Peningkatan

Jaringan Irigasi mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan di lapangan sehingga proses penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai batas waktu pada akhir tahun anggaran 2025 dan akan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran 2026.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini terealisasi sebesar 67,95%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang berjalan namun belum optimal. Keterlambatan pelaksanaan fisik atau administrasi menjadi faktor yang memengaruhi tingkat serapan anggaran dan proses penyerapan anggaran akan dibebankan pada tahun anggaran 2026 setelah melalui proses review dari Inspektorat Daerah.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
Program ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 90,29%. Kegiatan peningkatan, pembangunan, dan perluasan SPAM jaringan perpipaan memiliki tingkat realisasi di atas 88%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum. Namun demikian, kegiatan penyusunan rencana dan kebijakan SPAM tidak terealisasi (0%). Hal dikarenakan proses pengadaan dan pelaksanaan di lapangan sehingga proses penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai batas waktu pada akhir tahun anggaran 2025 dan akan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran 2026.
5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Dengan realisasi sebesar 94,89%, program ini tergolong sangat optimal, menunjukkan bahwa pembangunan sarana persampahan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
6. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini memiliki realisasi 93,54%, menandakan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan bangunan gedung

berjalan efektif, baik pada kegiatan fisik maupun pelayanan perizinan bangunan.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Realisasi mencapai 98,14%, merupakan salah satu program dengan kinerja terbaik, menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sangat matang.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini terealisasi sebesar 93,78%, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi sesuai target.
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Realisasi anggaran mencapai 80,47%, tergolong baik, meskipun masih terdapat ruang peningkatan, khususnya dalam percepatan pelaksanaan fisik pembangunan drainase perkotaan. Pada pelaksanaan pekerjaan fisik dapat terealisasi namun proses pencairan anggaran terdapat kendala pada beberapa paket proyek yang melebihi batas waktu pencairan sehingga akan dilakukan pembayaran melalui mekanisme pembayaran hutang pada tahun anggaran 2026.
10. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini memiliki pagu terbesar, namun realisasi sangat rendah sebesar 34,82%, dan menjadi faktor utama rendahnya realisasi total OPD. Rendahnya serapan terjadi hampir pada seluruh sub kegiatan, terutama pembangunan dan pemeliharaan berkala jalan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala signifikan seperti keterlambatan proses lelang, perubahan kebijakan anggaran, atau penyesuaian prioritas pembangunan. Pada pelaksanaan pekerjaan fisik dapat terealisasi namun proses pencairan anggaran terdapat kendala pada beberapa proyek yang melebihi batas waktu pencairan sehingga akan dilakukan pembayaran melalui mekanisme pembayaran hutang pada tahun anggaran 2026 dan juga terdapat beberapa paket yang proses penyelesaian fisiknya melampaui batas waktu pengerjaan sesuai dengan kontrak sehingga dikenakan denda keterlambatan dan penyelesaian pencairan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini terealisasi 79%, menunjukkan pelaksanaan cukup baik, terutama pada penyusunan RDTR. Namun, persetujuan substansi RTRW masih relatif rendah sebesar 66,45%. Hal ini dikarenakan ada paket jasa konsultasi yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran 2025 dan dialokasikan proses pembayarannya pada tahun anggaran 2026.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	91,59	91,59	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84,65	84,65	Tinggi
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	99,87	99,87	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	96,74	96,74	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	710,45	710,45	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	100,55	100,55	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	81,7	81,7	Tinggi
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan per satuan penduduk	165,22	165,22	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja PD			178,85	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi , meningkatnya

kualitas infrastruktur SDA , meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum , meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, ditemukan bahwa kinerja belum tercapai sesuai target, sehingga untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar . Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.3

Rencana Tindak Lanjut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDM di bidang perencanaan; • Perbaiki dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; • Menyelaraskan indikator kinerja dengan penganggaran; • Review berkala kesesuaian program, output, dan outcome; • Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritisasi berbasis data (risiko kerusakan, dampak layanan, dan manfaat ekonomi); • anggaran pemeliharaan minimal tetap tersedia tiap tahun; • Pengendalian & Evaluasi Kinerja
3.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan wilayah belum terlayani; • Skema pendanaan berkelanjutan; • pengendalian kebocoran
4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspansi layanan berbasis peta kebutuhan dan kepadatan penduduk; • Skema pendanaan berkelanjutan
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye pemanfaatan ruang sesuai aturan; • pendampingan pemohon izin; • Review kesesuaian pemanfaatan ruang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

**LAMPIRAN
VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN 2025**

1. Bidang Binamarga

Nama Kegiatan : Rehabilitasi Jalan Sumberagung - Watugede
(Ruas 404) (B.R.402)

Tanggal : 21 Oktober 2025 – 19 Desember 2025

Pelaksanaan

Tempat : Kecamatan Gandusari



Keterangan:

- Jalan Sumberagung – Watugede sebelumnya mengalami kerusakan parah, dengan banyaknya lubang dan permukaan yang tidak rata yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- Rehabilitasi Jalan Sumberagung - Watugede Kecamatan Gandusari dengan panjang 0,28 km dan lebar 5 m dengan menggunakan Konstruksi beton.
- Dengan adanya rehabilitasi jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah sehingga memudahkan mobilitas masyarakat, mempersingkat waktu perjalanan, dan memperlancar akses ke fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan pusat kesehatan.

Nama Kegiatan : Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Ilik-ilik Desa Kebonsari Kec. Kademangan (Ruas 382) & Pembangunan Saluran Drainase RT 01-01 Dusun Ilik-ilik - RT 04/01 Dusun Ilik-ilik, Kab. Blitar (Ruas 382) (B.D.237)

Tanggal : 23 Oktober 2025 – 31 Desember 2025

Pelaksanaan

Tempat : Kecamatan Kademangan



Keterangan:

- Talud Penahan Tanah Dusun Ilik – Ilik Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan sebelumnya sudah 2 tahun mengalami longsor sehingga kondisinya membahayakan pengguna jalan.
- Pembangunan Talud Dusun Ilik - Ilik Desa Kebondsari Kecamatan Wates ini dibangun pasangan batu dengan panjang 66 meter dengan tinggi variasi dengan rata – rata tinggi 5 meter, sedangkan pekerjaan AC-WC dikerjakan sepanjang 1,6 km
- Dengan adanya pembangunan Talud ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dan juga dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan potensial baik wisata, pertanian dan peternakan khususnya wilayah Kademangan, Wonotirto dan Bakung

2. Bidang Sumber Daya Air

Nama Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Sbr. Kendi
(D.XXV.74) (S.B.46)

Tanggal : 14 November 2025

Pelaksanaan

Tempat : Kecamatan Kesamben



Keterangan:

- Jaringan Irigasi Sbr. Kendi sebelumnya mengalami kerusakan pada pasangan/runtuh, sehingga dapat menyebabkan kebocoran dan kehilangan air. Hal ini mengakibatkan pasokan air pada sawah mengalami penurunan, dan dapat menurunkan produktivitas pertanian
- Peningkatan Jaringan Irigasi Sbr. Kendi dengan panjang 222,3 m dengan menggunakan Konstruksi pasangan batu.
- Dengan adanya Peningkatan Jaringan irigasi ini diharapkan dapat memulihkan fungsi jaringan irigasi, meningkatkan efisiensi distribusi air, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Nama Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Mangunan II
(A.III.20) (S.B.39)

Tanggal : 2 Desember 2025

Pelaksanaan

Tempat : Kecamatan Udanawu





Keterangan:

- Jaringan Irigasi Mangunan II sebelumnya masih berupa pasangan tanah, hal ini bisa menyebabkan tingginya kehilangan air akibat rembesan, kapasitas aliran tidak stabil, serta mudah terjadi sedimentasi dan kerusakan. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya distribusi air ke lahan pertanian dan meningkatnya kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan.
- Peningkatan Jaringan Irigasi Mangunan II dengan panjang 209,34 m dengan menggunakan Konstruksi pasangan batu.
- Peningkatan saluran irigasi dari pasangan tanah menjadi pasangan batu bertujuan untuk mengurangi kehilangan air, meningkatkan efisiensi distribusi air, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan fungsi saluran. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelayanan irigasi yang optimal dan berkelanjutan bagi lahan pertanian.

Nama Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Olak Alen
(D.XXVI.08) (S.B.44)
Tanggal : 3 Desember 2025
Pelaksanaan
Tempat : Kecamatan Selorejo



Keterangan:

- Jaringan Irigasi Olak Alen sebelumnya masih berupa pasangan tanah sebagian juga ada pasangan batu yang mengalami kerusakan/runtuh, hal ini dapat menyebabkan tingginya kehilangan air, menurunnya kapasitas dan kelancaran aliran, serta tidak optimalnya distribusi air ke

lahan pertanian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lanjutan dan meningkatkan kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan, sehingga diperlukan penanganan.

- Peningkatan Jaringan Irigasi Olak Alen dengan panjang 76,99 m dengan menggunakan Konstruksi pasangan batu.
- Peningkatan saluran irigasi memberikan manfaat berupa meningkatnya efisiensi dan kapasitas aliran, berkurangnya kehilangan air dan sedimentasi, serta lebih meratanya distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini mendukung keberlanjutan fungsi jaringan irigasi dan meningkatkan pelayanan irigasi secara optimal.

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Abab
Tanggal : 12 Agustus 2025
Pelaksanaan
Tempat : Aula Dinas PUPR Kabupaten Blitar





Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPPA DPK Abab yang meliputi
Kec.Nglegok, Kec. Garum, dan Kec. Kanigoro

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Lodoyo
Tanggal : 19 Agustus 2025
Pelaksanaan
Tempat : Kantor Kelurahan Kembangarum, Kec. Sutojayan





Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPPA DPK Lodayo Meliputi Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK
Lekso
Tanggal Pelaksanaan : 23 September 2025
Tempat : Kantor BPP Kecamatan Wlingi



Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Lekso Meliputi Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Selopuro.

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK
Sembung Kesamben
Tanggal Pelaksanaan : 24 September 2025
Tempat : Kantor Kecamatan Kesamben



Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Sembung Kesamben
Meliputi Kecamatan Doko dan Kecamatan Kesamben.

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK
Kreweng dan DPK Tanggung
Tanggal : 21 Oktober 2025
Pelaksanaan
Tempat : Kantor BPP Kecamatan Garum



Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Kreweng dan DPK Tanggung Meliputi Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Kanigoro.

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Putih dan DPK Dander
Tanggal : 22 Oktober 2025
Pelaksanaan
Tempat : Kantor BPP Kecamatan Talun



Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Putih dan DPK Dander Meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Talun.

Nama Kegiatan : Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Kajar
Tanggal : 6 November 2025
Pelaksanaan
Tempat : Kantor Kecamatan Ponggok



Keterangan:

Peserta Peningkatan Kinerja HIPPA/GHIPA DPK Kajar Meliputi Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, dan Kecamatan Wonodadi.

Nama Kegiatan : Pembangunan Jambanisasi – Mandesan
Kecamatan Selopuro;
Tanggal : 6 Januari 2026
Pelaksanaan
Tempat : Kecamatan Selopuro



Keterangan:

- Program jambanisasi di harapkan dapat meningkatkan akses layak Kabupaten Blitar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Program jambanisasi tahun 2025 dilaksanakan di 17 Desa dan 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar dengan jumlah 190 unit.
- Target penerima program jambanisasi diutamakan masyarakat Kabupaten Blitar yang belum mempunyai akses sanitasi layak dengan prioritas penerima Keluarga Anak Stunting, Keluarga beresiko Stunting, Miskin Ekstreem dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)/ Miskin.

3. Bidang Cipta Karya

Nama Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngreco Kecamatan Selorejo

Tanggal : 27 Oktober 2025 - 25 Desember 2025

Pelaksanaan

Tempat : Kecamatan Selorejo



Keterangan:

- Desa ngreco daerah rawan air minum karena dekat dgn bendungan lahor, dimana daerah tsb aliran air bawah tanah terhambat karena efek dari grouting pada badan bendungan lahor sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumur gali terlindungi, oleh karena itu dinas PUPR melakukan pekerjaan sistem penyediaan air minum (spam) jaringan perpipaan yang bermanfaat bagi warga setempat

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja**
- B. Indikator Kinerja Utama**
- C. Perjanjian Kinerja**
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah**

B. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

No.	Sasaran Rencana	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Skor dan nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	LME dari Inspektorat daerah	Sekretaria Dinas
2	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi Kabupaten - Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan - Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di Kabupaten Blitar	Data capaian dari Bidang SDA	Kepala Bidang Sumber Daya Air
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan adalah jumlah rumah tangga yang terlayani air minum	Data capaian dari bidang Cipta Karya	Kepala Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga berakses air limbah domestik layak dan aman	Jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat (off-site) maupun sistem setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku	Data capaian dari bidang Sumber daya Air	Kepala Bidang Sumber Daya Air
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Jumlah PBG yang sesuai peruntukannya adalah jumlah PBG yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan dan Jumlah PBG yang berlaku adalah jumlah total pengajuan PBG yang sudah disetujui	Data KRK dan SLF	Kepala Bidang Cipta Karya
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan	Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan tingkat kerusakan $\leq 6\%$	Data DD-1 Bidang Jalan	Kepala Bidang Binaamarga
7	Meningkatnya kesesuaian	Persentase ketaatan	Jumlah pembangunan yang taat terhadap	Data KKPR	Kepala Bidang Tata

Dokumen ini telah disediakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
	pemanfaatan ruang	pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK		Ruang
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	Luas area pelayanan persampahan adalah jumlah total luas wilayah (desa/ dusun) yang sudah dibangun TPS/TPA/TP3R di Kabupaten Blitar Luas area Kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah Kabupaten	Data pembangunan dan rehabilitasi TPS/TPA/TP3R dari Bidang Cipta Karya Data luas wilayah dan jumlah penduduk dari BPS	Kepala Bidang Cipta Karya

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 13 November 2025
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,



Iwan Dwi Winarto, S.T. MM.T
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197701092003121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DICKY COBANDONO, S.Sos., M.SI**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Hj. RINI SYARIFAH**

Jabatan : **BUPATI BLITAR**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


BUPATI BLITAR,

Hj. RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

DICKY COBANDONO, S.Sos., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700912 199201 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	B+
		Nilai SAKIP	B+
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	100
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur SDA	Rasio Jaringan Irigasi	61,78
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah	Persentase RT berakses air minum	85,9
		Persentase RT berakses pengolahan air limbah domestik	72,7
5	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	47
		Rasio Kepatuhan IMB	1,54
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	82,66
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	79,11
		Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	21
7	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	53,6
8	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	90
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	0,412

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.894.171.526	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.601.438.000	APBD /DAK/ DID
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan	6.000.000.000	APBD

	Sistem Penyediaan Air Minum		/DAK/DID
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	259.962.000	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.615.000.000	APBD /DAK
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	42.946.516.169	APBD / DID
7	Program Penataan Bangunan Gedung	8.114.002.800	APBD
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	294.543.200	APBD
9	Program Penyelenggaraan Jalan	44.433.682.700	APBD /DAK
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	115.892.000	APBD
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.794.000.000	APBD
	JUMLAH :	149.069.208.395	


Blitar, 31 Januari 2025



 BUPATI BLITAR,

HL. RINI SYARIFAH

KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG


DICKY COBANDONO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700912 199201 1 002

Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IWAN DWI WINARTO, ST., MM.T**

Jabatan : **Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar**

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. H. RIJANTO, MM**

Jabatan : **BUPATI BLITAR**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 8 September 2025

**Pit. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BLITAR**


Drs. H. RIJANTO, MM


IWAN DWI WINARTO, ST., MM.T
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 19770109 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,65
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Rasio Jaringan Irigasi	68,08
3	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	90,84
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman	93,50
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	Rasio Kepatuhan PBG dan SLP Kabupaten/Kota	6,60
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	80,18
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	90
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	19,15

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.155.310.179	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.312.881.400	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.475.951.670	APBD
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	250.981.000	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.406.918.000	APBD
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	18.748.765.369	APBD
7	Program Penataan Bangunan Gedung	11.695.128.229	APBD

8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	103.191.200	APBD
9	Program Penyelenggaraan Jalan	133.728.533.907	APBD
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	107.946.000	APBD
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.298.000.000	APBD
JUMLAH :		199.283.606.984	

Blitar, 8 September 2025

Pt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BLITAR



BUPATI BLITAR,

Des. H. RIJANTO, MM



IWAN DWI WINARTO, ST., MM.T
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 19770109 200312 1 003

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT/ KELUARAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyusunan DFA, Renstra Perubahan, LPTD, LKJP, LKPD	√	√	√										
2	Penyusunan DFA, Renstra Perubahan, LPTD, LKJP, LKPD	√	√	√										
	Input SEPD dan RUP	√												
	Kegiatan Penyusunan dan upload RUP dan SEPD	√												
3	Laporan Bulanan, Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Laporan Bulanan, Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Laporan Bulanan, Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Belanja Bahan Habis Pakai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	Belanja Bahan Habis Pakai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	Belanja Bahan Habis Pakai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	Belanja Bahan Logistik Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	Belanja Barang Cetak dan Penguasaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	Belanja Bahan Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta Belanja makan dan minum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	Belanja Kursi Pejabat	√	√											
13	Belanja AC, Komputer dan Televisi	√	√											
14	Belanja Jasa Listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	√	√	√										
17	Kendaraan Operasional/ Lapangan yang dipelihara	√	√	√										
18	Belanja Belanja Suku Cadang dan Bahan pelumas untuk Alat Berat	√	√	√										
19	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Sewa Tanah Workshop dan pajaknya)	√	√	√										

	Konsultasi Evaluasi Persetujuan Substansi RRTR							√	√	√	√	√	√	
	Penetapan RRTR							√	√	√	√	√	√	
46	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen RTRW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
47	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen RRTR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Mengetahui,
 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Perumahan Ruang
 Kabupaten Bitar



IRWAN DINI WINIBRO, ST., M.M.T
 Pembina Tk. I / Vb
 NIP. 19770109 200312 1 003